BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sajikan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Bina Marga yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan adalah sebagai pelaksana dalam pengembangan dan perawatan prasarana fisik atau pembuatan sarana penunjang transportasi darat yang sangat berperan aktif bagi perkembangan dan pertumbuhan baik dari segi sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan bangsa. Dengan pertumbuhan yang sangat pesat ini maka pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kehidupan manusia, dan semuanya telah diatur oleh Undang Undang Dasar 1945 dan berdasarkan atas asas pancasila.
2. Dengan semakin besarnya volume perkembangan dan pembangunan yang ada dan memerlukan banyak pengeluaran dalam hal ini baik segala sesuatu yang telah dianggarkan baik untuk beban biaya rutin maupun beban biaya pembangunan, maka dalam hal ini pemerintah mengharapkan seluruh aparatnya untuk terampil, sehingga penyalenggaraan Tata Usaha

kebendaharaan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Prosedur pengeluaran kas yang melalui seorang Bendaharawan daerah yang merupakan salah satu alat pengendalian pengeluaran intern pada Dinas Bina Marga telah dilaksanakan dengan baik, sehingga telah mampu mengendalikan pengeluaran kas dengan prosedur prosedur yang telah ditentukan. Dimana dalam struktur pengendalian pengeluaran kas pada Dinas Bina Marga sudah terjadi suatu pemisahan fungsi yang baik, yang mencakup tugas, wawanang, dan tanggung jawab dari masing masing bagian sub dinas yang terkait. Dengan demikian maka telah tercipta suatu makanisme kontrol yang otomatis atas pengendalian pengeluaran kas, sejalan dengan itu telah diterapkannya prosedur yang tepat, aman. Dokumen yang digunakan dalam sistem Akuntansi pengeluaran kas telah lengkap, berangkap dan bernomor urut, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.
4. Prosedur pengeluaran kas yang melalui seorang Bendaharawan daerah yang merupakan salah satu stuktur pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka pengamanan pengeluaran kas sehingga dapat membantu pihak pengambilan keputusan dalam hal ini seorang pimpinan dalam pengeluaran kas dengan cara memeriksa transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dari catatan dokumen pendukung dan otorisasinya,

serta tujuan dari manajemen dapat dipertanggung jawabkan laporan atas pengeluaran kas secara tepat, cepat dan akurat.

5. Adapun dokumen – dokumen pendukung yang terkait :

- Dalam penata usahaan dan laporan :
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
  - SPP Beban Sementara
  - SPP Beban Tetap\
- Tata pembukuan Bendaharawan daerah :
  - Register
  - Buku Kas Umum
  - Buku Pembantu
  - Buku Panjar atau uang muka
  - Buku PPN / PPh
- Surat pertanggung jawaban dan laporan :
  - Surat Pertanggung Jawaban
  - Surat Laporan

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna dan bermanfaat bagi penyempurnaan proses pengeluaran kas yaitu :

a. Seiring dengan berkembangnya suatu teknologi dan ilmu pengetahuan dan untuk menyamakan keterampilan maka agar para aparat pelaksana terlebih dahulu memperoleh suatu bahan mengenai apa dan bagai mana cara pelaksanaan administrasi keuangan dearah melalui suatu pusat pendidikan dan pelatihan pegawai.

b. Dalam suatu pengawasan maka harus terus dipantau secara berkala atau secara periodik untuk menjaga kebenaran kas tersebut benar benar aman dan terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

c. Lebih meningkatkan disiplin bagi para pegawai agar benar benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM